



PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Wiwi Idawati^{1*}, Lia Eleonora²

¹wiwi.idawati@ibs.ac.id, ²lianora31@gmail.com

¹STIE Indonesia Banking School, ²Staf Pemerintah Kota Bekasi

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sistem pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan merupakan faktor penting dalam pembentukan kualitas laporan keuangan, terutama di Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 114 responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi. Model dasar penelitian ini adalah kausalitas menggunakan alat analisis Structural Equation Model (SEM) sehingga analisisnya lengkap dan tidak bias. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan faktor akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerintahan Pemerintahan yang Baik (GGG).

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern; Akuntabilitas Keuangan; Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the system of internal control and financial accountability is an important factor in the formation of the quality of financial reports, especially in the Bekasi City Government. This study uses primary data by distributing questionnaires to 114 respondents in the Regional Government Work Unit (SKPD) of Bekasi City Government. The basic model of this research is causality using Structural Equation Model (SEM) analysis tools so that the analysis is complete and unbiased. The results of this study prove that the internal control system influences the quality of the financial statements of the Bekasi City Government and financial accountability influences the quality of the Government's financial statements. Bekasi City, so it can be concluded that the internal control system and financial accountability factors in the Bekasi City Government play a strategic role in creating a Good Government Governance (GGG) government.

Keywords: Internal Control System; Financial Accountability; Quality of Financial Statements



PENDAHULUAN

Di Indonesia, berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen nasional untuk mewujudkan *good governance* telah menjadi faktor penting yang mendorong pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi sebagai konsekuensi logis demokratisasi untuk membangun *good governance*. Desentralisasi atau otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai keanekaragaman kondisinya masing-masing. Melalui desentralisasi, daerah akan mengalami proses pemberdayaan sehingga memacu kemampuan prakarsa dan kreativitas daerah serta meningkatkan kapabilitas daerah dalam menangani berbagai masalah domestik (Sony Yuwono et.al 2007:12-13).

Sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran ke daerah, maka permasalahan pengelolaan keuangan daerah antara lain a) Penerapan kebijakan penganggaran belum sepenuhnya mendukung kemiskinan, pekerjaan dan pertumbuhan (Djalil:2014:393), (b) Penyerapan anggaran yang relatif rendah serta lambat, khususnya disektor riil (Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012: 4) dan (c) Penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Bekasi Tahun 2014 menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "berkembang." Adapun Level berkembang artinya, Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi sehingga efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga kelemahan belum ditangani secara memadai (SE Walikota Bekasi No:700/334/ITKO Tanggal 26 januari 2015).

Setiap entitas pelaporan, termasuk pemerintah daerah, mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan (Faud,2015). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif (Mardiasmo: 2009). Djalil (2014) menyatakan, gambaran kualitas informasi laporan keuangan diungkapkan melalui pernyataan pendapat/opini mengenai kewajaran laporan keuangan, dengan empat jenis opini sebagai berikut (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified opinion*), termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan; (2) Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified opinion*), yaitu secara keseluruhan wajar kecuali untuk hal-hal tertentu; (3) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse opinion*) dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer opinion* atau *No opinion*), yaitu auditor tidak memperoleh cukup bukti untuk membuat pendapat. Keempat jenis opini yang mencerminkan tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut diambil oleh auditor dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Erlina, 2015).

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Keterangan	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
	Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jumlah	Nilai (Rp juta)
	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)		
Kelemahan Sistem Pengendalian Internal								
1. SPI (I)	5.978	-	-	-	56	-	6.034	-
2. SPI (II)	474	-	2	-	1.132	-	1.608	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
1. Berdampak Finansial (I)	3.638	3.205.219,98	-	-	78	8.699.039,73	3.716	11.904.259,71
2. Berdampak Finansial (II)	297	239.588,51	12	167.902,47	1.723	2.792.092,4	2.032	3.199.583,38
3. Non Finansial (I)	2.355	-	23	-	42	2.492.701,04	2.420	2.492.701,04
4. Non Finansial (II)	210	-	2.171	374.788,12	715	171.543,80	3.096	546.331,92
Total Pemda dan BUMD (I)	11.971	3.205.219,98	23	-	176	11.191.740,77	12.170	14.396.960,75
Total Pemda dan BUMD (II)	981	239.588,51	2.185	542.690,59	3.570	2.963.636,20	6.736	3.745.915,30
Jumlah LHP (I)	504		3		11		518	
Jumlah LHP (II)	35		240		296		571	
Jumlah Temuan (I)	7.888		17		114		8.019	
Jumlah Temuan (II)	613		1.988		2.494		5.095	

Sumber: IHPS Semester I dan II (2015)

Pada tahun 2016, untuk pertama kalinya laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2015 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini berarti, laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 40.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016). Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 40.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016), BPK menemukan pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan operasinya sebagai berikut: (1) Penataan dan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum optimal; (2) Penatausahaan Investasi Non Permanen Lainnya belum memadai; 3) Masih terdapat tanah untuk fasos/fasum senilai Rp 75,74 miliar yang tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan diantaranya senilai Rp 7,23 miliar tidak diketahui keberadaannya dan (4) Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Bekasi belum memadai. Setiap entitas pelaporan, termasuk pemerintah daerah, mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah sistem pengendalian intern, akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bekasi). Kuesioner disebarikan kepada 114 responden yang terdiri dari para Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggota Satuan Petugas SPIP dan Auditor. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bekasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan juga untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Akuntabilitas keuangan yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bekasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Hasil penelitian Nurul Apriyanti (2014) menunjukkan Sistem pengendalian internal pemerintah dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena Sistem pengendalian internal pemerintah telah menjalankan unsur-unsur Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan dengan baik. Sedangkan akuntabilitas telah menjalankan unsur-unsur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi keuangan, akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Beberapa definisi terkait Sistem Pengendalian Intern antara lain menurut menurut The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Threadway Commission dalam (Zamzani et al. 2015) adalah: *“A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectiveness and efficiency of operations (2) the reliability of financial reporting and (3) the compliance of applicable laws and regulations.”* Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dirancang oleh manajemen dan dilakukan oleh personel disemua tingkatan organisasi, untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan menjamin efisiensi dan efektivitas proses operasi, keandalan catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Arens et al. (2012) *internal control* : *“A process designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) the reliability of financial reporting, (2) the effectiveness and efficiency of operations and (3) the compliance with applicable laws and regulations.”* Diterjemahkan menjadi proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan

manajemen dalam kategori berikut ini: (1) reliabilitas pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, serta (3) ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi, kewajiban tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern di masing-masing entitas pelaporan dan akuntansi semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Psl.1 (1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan." Sehingga dalam hal ini menurut Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 Psl.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah : "Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi."

Zamzani et al. (2015) dalam usaha mencapai tujuan dan sasarannya, perusahaan membutuhkan pengendalian internal (*internal control*). Penerapan pengendalian internal akan: (a) mengurangi ketidaksiapan terhadap hal-hal yang belum direncanakan sebelumnya, (b) memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomis dan lingkungan kompetitif yang berjalan terus-menerus, (c) memberikan jaminan efisiensi, (d) menurunkan resiko kerugian asset, (e) menjamin reliabilitas laporan keuangan, dan (f) menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern. Konsep dasar pengendalian memandang bahwa sistem pengendalian intern bukan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi sesaat atau mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar, bahwa tujuan akan dicapai. Tindakan-tindakan ini melekat dan melingkupi ke dalam cara manajemen dan personil dalam menjalankan kegiatannya (Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2012:13). *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas di terima di Amerika Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian internal meliputi: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi dan (5) Pemantauan. Penjelasan masing-masing unsur-unsur SPIP sesuai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 Tahun 2012 (2012) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisa risiko.
3. Kegiatan Pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik dan mekanisme yang membantu memastikan kepatuhan terhadap arahan

pimpinan yang sudah ditetapkan untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko.

4. Informasi dan Komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Mengevaluasi Pengendalian Intern

Untuk memastikan beroperasinya pengendalian yang relevan sejak awal sampai pelaporan keuangan adalah dengan memastikan bahwa pengendalian intern sudah dimutakhirkan dan terdokumentasi dengan baik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendokumentasikan pengendalian intern yang relevan adalah: 1) Bagaimana transaksi signifikan disiapkan, diotorisasi, dicatat, diolah, dan dilaporkan; 2) Detil arus transaksi cukup untuk menentukan titik-titik dimana salah saji material dan 3) Pengendalian intern selama periode proses pelaporan keuangan, termasuk estimasi akuntansi dan pengungkapannya (Theodarus, 2015).

Akuntabilitas Keuangan

Gambaran mengenai definisi akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini berdasarkan dari beberapa pendapat antara lain: Hoesada (2015) mengatakan akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi Pemerintah dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Fitrawansyah (2015) menyatakan bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP 71 Tahun 2010 dalam Rizal Djalil:450). Sementara menurut Setiyono (2014) akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari sekedar transparansi karena akuntabilitas memungkinkan adanya negative feedback setelah keputusan atau tindakan diambil, sedangkan transparansi memungkinkan negative feedback sebelum dan selama keputusan atau tindakan diambil. Dengan demikian, akuntabilitas memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi. Menurut Djalil (2014) Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Komponen dari akuntabilitas keuangan terdiri dari: 1) Integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian, informasi yang terkandung

didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; 2) Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi dan 3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan (Diana, 2012).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi

Menurut Hasanah et. al. (2016) dalam kurun waktu 12 tahun di era reformasi, Indonesia sedang melakukan pembenahan disegala bidang, termasuk pengelolaan keuangan negara. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah Sujawerni (2015). Menurut Faud (2015) Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.

Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Suwanda et.al, (2014) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Suwanda et.al, (2014) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1) Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu (Utomo,2008). Informasi yang relevan harus : a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya memuat informasi, yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu, b. prediktif (predictive value), artinya memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c.Tepat waktu, artinya harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan. d.Lengkap, artinya memuat informasi akuntansi yang selengkap mungkin,

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan; 2) Andal, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

Menurut Yogja (2012) netralitas artinya memuat informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan pihak tertentu. Dapat dibandingkan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan batas pemahaman pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi.

Pengembangan Hipotesis

Sistem pengendalian intern sebagai suatu proses integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus, akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dan menjadi bagian dari organisasi (*built in*). Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga kelemahan belum ditangani secara memadai (SE Walikota Bekasi No:700/334/ITKO Tanggal 26 Januari 2015). Dalam penelitian Tuti Herawati (2014), variabel Sistem Pengendalian Intern terdiri dari Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Cianjur. Pengendalian internal sangat bergantung pada pelaksana dan penggunaannya, pengendalian hanya akan berjalan dengan baik jika dapat memenuhi kebutuhan pengguna yaitu dapat dipraktikkan dan bermanfaat, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Setiap entitas pelaporan, termasuk pemerintah daerah, mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif (Mardiasmo: 2009). Dalam penelitian Dinie Rachmawaty (2014), menunjukkan variabel Akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini pertanggungjawaban publik dari institusi publik menjadi sangat diperlukan, karena tindakan pemerintah pada hakikatnya adalah tindakan yang harus

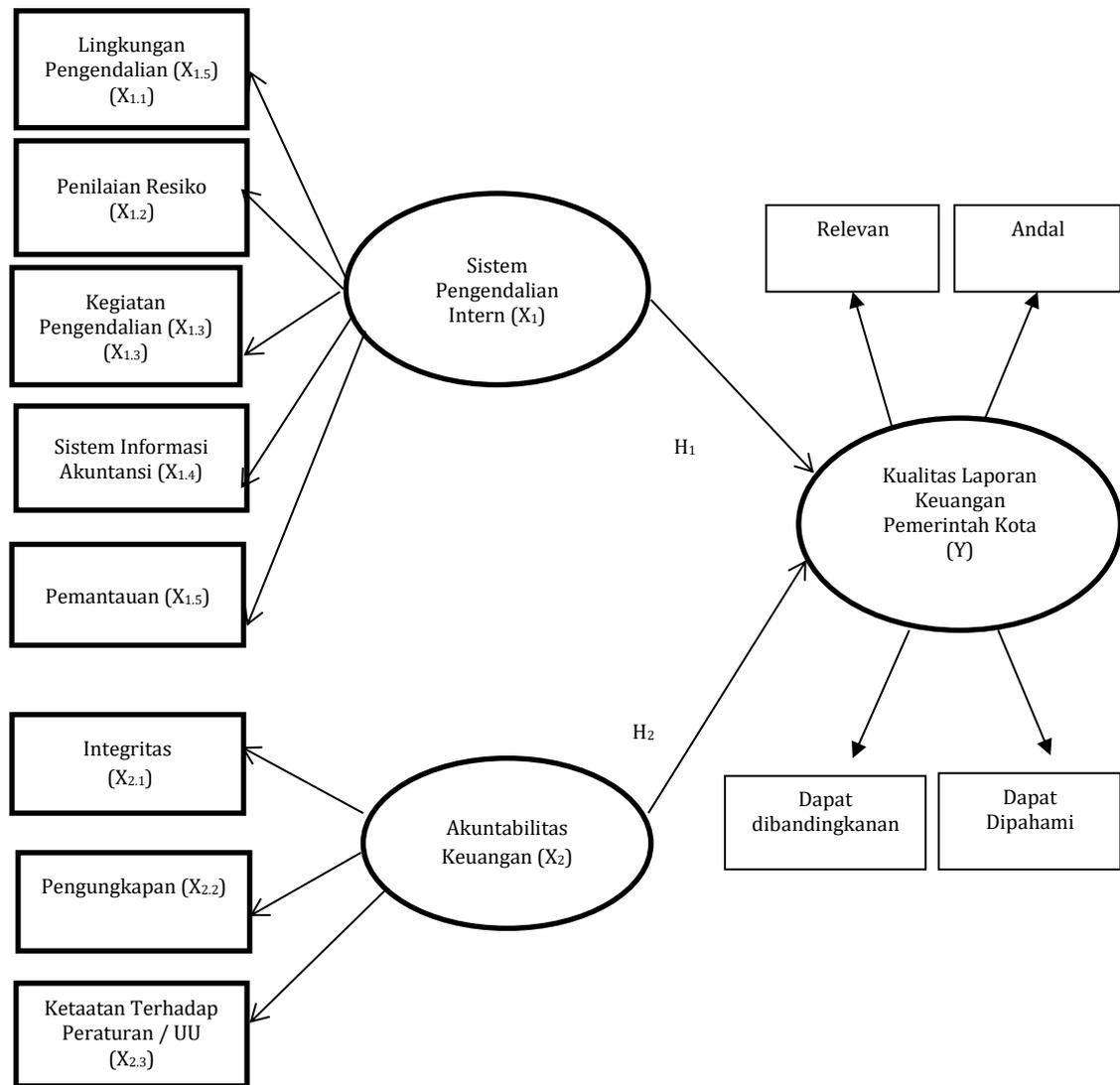
mencerminkan kehendak dan keinginan rakyat yang tercermin melalui suara dalam lembaga perwakilan sehingga dapat memberikan jaminan kepada warga negara bahwa tindakan yang terbaik akan selalu dipersembahkan oleh para penyelenggara negara. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Sedangkan hasil penelitian Yogya (2012), pada pengujian simultan variabel Pengaruh penerapan pengendalian intern (X_1) dan Akuntabilitas keuangan (X_2) terhadap Kualitas laporan keuangan instansi pemerintah (Y), menunjukkan variabel Pengaruh penerapan pengendalian intern (X_1) dan Akuntabilitas keuangan (X_2) berpengaruh sebesar 52,40% terhadap Kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dikatakan Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang disusun memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan SKPD hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintah daerah itu sesuai Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan berdasarkan hal ini maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian intern dan Akuntabilitas keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah (2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para anggota Satuan petugas SPIP di SKPD yang bertugas mengawal tahapan penyelenggaraan SPIP, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, Auditor dan pelaksana selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerapan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan serta kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Populasi dan Sampel Penelitian

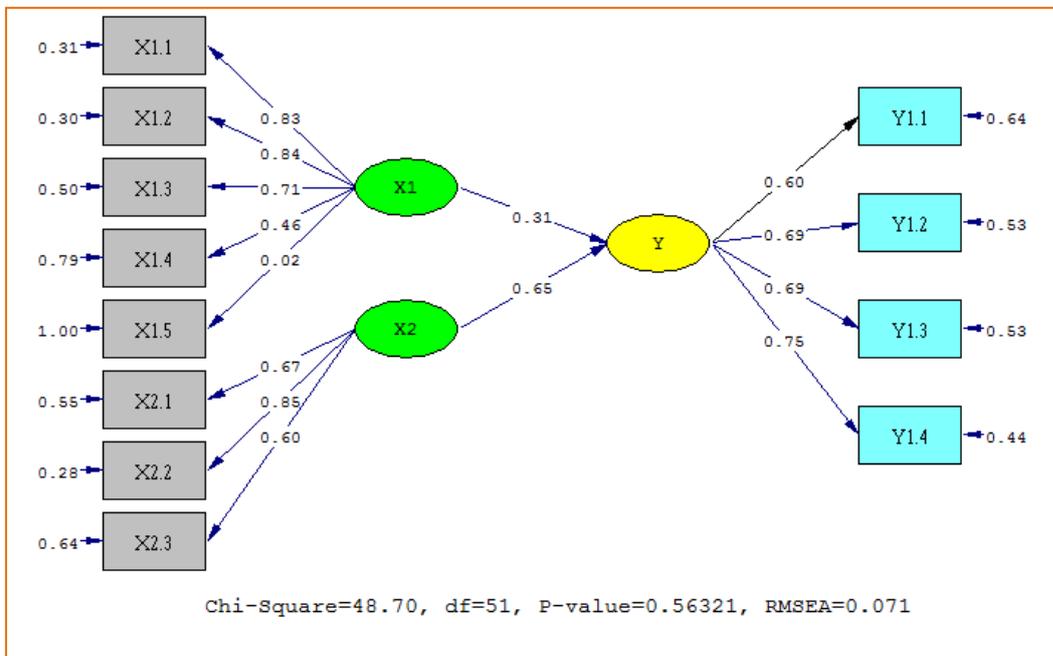
Peneliti menggunakan populasi dari anggota Satuan petugas SPIP di SKPD yang bertugas mengawal tahapan penyelenggaraan SPIP, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, Auditor dan pelaksana selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebanyak 114 orang. Sebagai pedoman dalam menentukan ukuran sampel dalam analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) sebagai berikut: (a) Ukuran sampel 100-200 untuk teknik estimasi Maximum Likelihood (ML), (b) Bergantung pada jumlah parameter yang di estimasi. Penyebaran kuesioner sebanyak 114 dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala *Likert* tujuh poin dengan pilihan nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 7 (tujuh) semuanya telah berisi lengkap dan telah memenuhi syarat untuk dapat diolah menggunakan program Lisrel 8.70.

HASIL

Pengujian Identifikasi Dalam Model SEM

Pilot tes pada penelitian ini terhadap 12 konstruk dengan jumlah indikator antara 1 sampai 12 indikator dan menggunakan skala 1 sampai 7. Pilot tes dilakukan terhadap 60 responden. Berdasarkan hasil pengujian pilot tes dengan menggunakan Lisrel versi 8.7 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2. Output Model Pilot Test



Sumber: Data Diolah (2019)

Hasil Analisis Masalah Identifikasi pada Model X₁ :

Dengan model estimasi $X_1 = f(X_{1.1}, X_{1.2}, X_{1.3}, X_{1.4}, X_{1.5})$. Jika β adalah parameter yang diestimasi dan S adalah jumlah varians dan kovarians antar variabel manifest maka diperoleh hasil indentifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah $\beta = 5$
2. Jumlah S = 15
3. Maka $\beta < S/2$ atau $5 < 7,5$

Hasil pengujian diatas menunjukkan model *over indentified*, sehingga agar hasil koefisiennya tidak bias maka perlu menambah responden agar dapat menghasilkan angka yang unik, dengan terlebih dahulu melakukan model yang berbeda dengan menambah/mengurangi indikator, seperti terlihat pada pilot test sebelumnya.

Hasil Analisis Masalah Identifikasi pada Model X₂

Selanjutnya akan dilakukan pengujian identitas pada X₂ dengan model estimasi $X_2 = f(X_{2.1}, X_{2.2}, X_{2.3})$. Jika β adalah parameter yang diestimasi dan S adalah jumlah varians dan kovarians antar variabel manifest maka diperoleh hasil indentifikasi sbb:

1. Jumlah $\beta = 3$
2. Jumlah S = 6
3. Maka $\beta = S/2$ atau $3 = 3$

Hasil pengujian menunjukkan model *just indentified*, dengan hasil koefisiennya yang unik maka tidak perlu menambah responden karena akan menghasilkan angka yang unik, sehingga tidak perlu merubah apapun karena data dan jumlah responden (114) sudah sangat cocok.

Hasil Pengujian Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data Melalui Univariate

Variabel	Skewness		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
	Z- Score	P-Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Value
X1	0.735	0.462	-1.397	0.057	9.667	0.167
X2	-0.236	0.813	-1.423	0.065	5.926	0.052
Y	0.012	0.990	-1.043	0.059	6.346	0.071

Sumber: Data Diolah (2019)

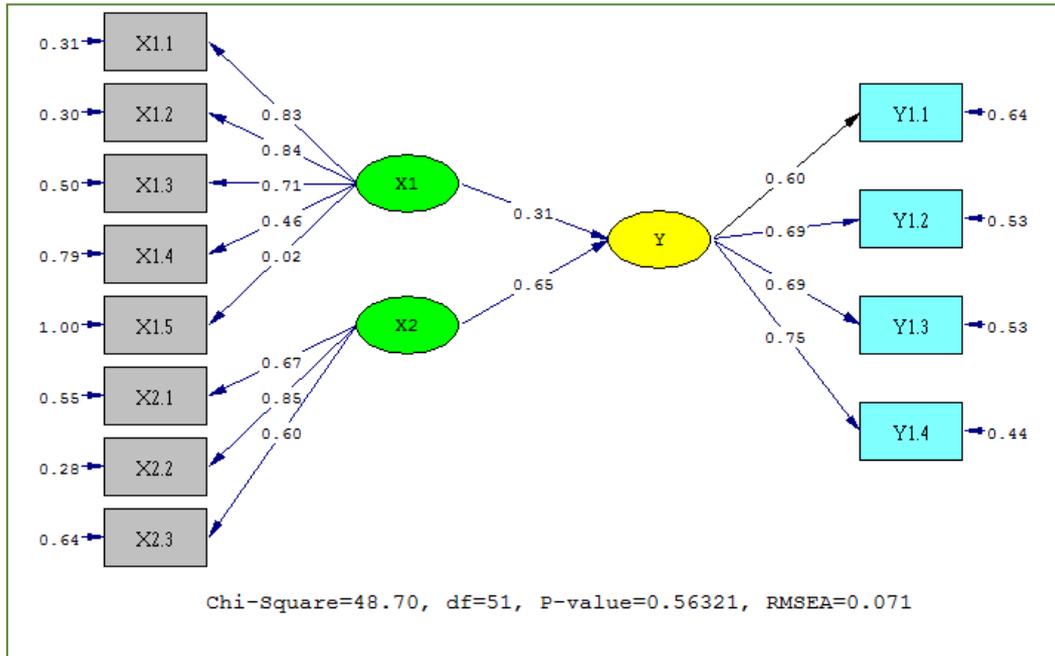
Tabel di atas menunjukkan nilai Skewness dan Kurtosis pada P-Value $\geq 0,05$ tidak ada yang signifikan, sehingga menolak Ha dan menerima Ho, dengan kata lain bahwa semua data penelitian yang menjadi variabel dalam model adalah normal.

Hasil Pengujian Model Keseluruhan

Tahap ini berkaitan dengan respesifikasi model berdasarkan hasil uji indentifikasi. Pada tahap ini, model semula 12 konstruk dengan jumlah indikator antara 1 sampai 12 indikator dan menggunakan skala 1 sampai 7 dengan jumlah responden 60, direspesifikasi menjadi 12 konstruk dengan jumlah indikator antara 1 sampai 12 indikator dan menggunakan skala 1 sampai 7 dengan jumlah responden

114. Berdasarkan pengujian model respesifikasi dengan menggunakan Lisrel versi 8.7 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 3. Output Respesifikasi



Sumber: Data Diolah (2019)

Dari hasil pengolahan model keseluruhan, yang menunjukkan kesesuaian model dengan data empiris, diperoleh nilai *Goodness of Fit Index* (GFI)= 0,97. Nilai tersebut, mengindikasikan bahwa model fit (*good fit*) atau dengan kata lain Indeks kesesuaian (*Fit index*) ini 97% proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang terestimasi. Demikian pula indikator *Adjusted Goodness-of-Fit Index* (AGFI)= 0,92 yang diinterpretasikan sebagai tingkatan yang baik (*good overall model*). Baik GFI maupun AGFI adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam sebuah matriks kovarians sampel. Indikator lain untuk mendeteksi kebaikan model yaitu RMSEA (*The Root Mean Square Error of Approximation*) adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk menkompensasi *chi-square statistic* dalam sampel yang besar. Dari hasil pengujian model terlihat nilai RMSEA = 0,071 < 0,08 mengindikasikan *good fit model*.

Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Pertanyaan Model Penelitian

Untuk menjamin suatu penelitian valid atau sah dan konsistennya, maka diperlukan pengujian butir-butir pertanyaan melalui uji validitas dan reliabilitas sehingga penelitian ini dijamin sah dan konsisten walau dalam waktu yang berbeda. Valid atau sahnya suatu pertanyaan dalam kuesioner memiliki arti yang sangat penting dan strategis mengingat tahap ini merupakan pintu awal dari sebuah penelitian ke analisis selanjutnya. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat dari nilai *loading factor*, yakni seberapa besar koefisien variabel laten dapat di representasikan oleh butir pertanyaan dari output *Lisrel Estimates* (*Maximum*

Likelihood) dapat dijadikan sebagai indikator validitas yakni dari *convergent validity* dengan *standardized loading* > 0,50 (Imam Ghazali; 2012). Dari uraian diatas dapat dipastikan bahwa *loading factor* telah memenuhi syarat minimum > 0,50 dengan nilai $R^2 > 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa indikator/*observed* yang merefleksikan variabel konstruk telah cocok baik secara teoritis maupun empiris. Koefisien *Loading factor* yang cukup besar (rata-rata > 0,60) menunjukkan bahwa penetapan indikator pada kuesioner yang berlandaskan pada teori telah sesuai dengan empiris di pemerintah daerah Kota Bekasi. Sebagai salah satu deskripsi empiris adalah sistem pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) keandalan laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, (3) efektifitas dan efisiensi operasi.

PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dengan koefisien parameter sebesar 0,0491, nilai-t sebesar 0,022 , maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sangat signifikan pada $\alpha = 5\%$, sehingga ada pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Hasil tersebut mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Herawati (2014) yang menyatakan bahwa Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan secara simultan, dimana sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia sehingga efektivitas sistem pengendalian intern sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menghasilkan koefisien= 0.715, hal ini mengindikasikan jika Akuntabilitas Keuangan naik sebesar 1 (satu) satuan, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi akan naik sebesar 0,715 satuan. Hal ini jika diinterpretasikan lebih luas yakni laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga lainnya harus disajikan dengan benar sehingga bisa memiliki kualitas yang baik yaitu yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dipahami oleh para penggunanya. Hasil penelitian ini patut untuk dipercaya mengingat hasil $p\text{-value} = 0,022 < \alpha = 5\%$ atau 0,05 sehingga hipotesis bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Rachmawaty (2014) yang menyatakan: Variabel Akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian regresi dengan Eviews, menghasilkan $F_{hitung} > F_{tabel}$, $p\text{-value} = 0,00 < 0,05$ ini berarti Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan Akuntabilitas Keuangan (X_2) secara simultan mempengaruhi terhadap Y , sehingga H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama (X_1 dan X_2) tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen y ditolak. Ini menunjukkan menerima H_a yang menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama (X_1 dan X_2) mempengaruhi terhadap variabel dependen y diterima. Variabel Sistem pengendalian internal pemerintah dalam penelitian Apriyanti (2014): Pengaruh Sistem pengendalian internal pemerintah dan Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah menunjukkan Sistem pengendalian internal pemerintah dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Akuntabilitas secara parsial menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena Sistem pengendalian internal pemerintah telah menjalankan unsur-unsur Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan dengan baik. Sedangkan akuntabilitas telah menjalankan unsur-unsur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi keuangan, akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan sampel penelitian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi maka dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian intern dan Akuntabilitas keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan semakin baik mengimplementasikan seluruh dimensi pada Sistem pengendalian intern dan Akuntabilitas keuangan akan berdampak terhadap peningkatan Kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kota Bekasi, sehingga dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat di implementasikan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak Pemerintah Kota Bekasi serta Pemangku kepentingan seperti Satuan Tugas SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengawal penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat meningkatkan praktik pengendalian intern saat ini menjadi praktik pengendalian intern yang terdokumentasi baik yang melibatkan semua unit organisasi dan terlaksananya proses evaluasi atas pengendalian intern, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan dalam meminimalisasi penyebab kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas keuangan di lingkungan SKPD masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, demikian juga para pemeriksa internal (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) dan pemeriksa eksternal (BPK) sebagai bahan

pengetahuan dan pertimbangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan khususnya bidang keuangan dalam menentukan prosedur pemeriksaan pengujian sistem pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan.

Adapun saran dalam penelitian Penelitian serupa dapat dilakukan pada Pemerintah Provinsi/Daerah lain yang memungkinkan diperoleh responden dengan jumlah yang lebih dari 200 responden, sehingga indikator-indikator pada variabel-variabel yang ada dalam model penelitian menjadi lebih lengkap sesuai teori yang terkait penelitian dalam pengembangan model penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan khususnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan dimasa yang akan datang penelitian dapat dilengkapi dengan indikator lain selain faktor Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan sebagai faktor-faktor penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto Hartono. 2009. Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Arens, Alvin, Elder, Randal J, & Mark S. Beasley. 2015. *Auditing & Jasa Assurance: Terintegrasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Asra, Abuzar & Prasetyo, Achmad. 2015. *Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Survei*. Depok: Rajagrafindo.
- Blerkom, M.L.V.2009. *Measurement and Statistics for Teachers*. New York: Routledge
- BPK-RI.2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 Pemerintah Kota Bekasi.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Wahana Semesta Intermedia.
- Erlina, Omar & Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Faud, M. Ramli. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fitrawansyah. 2015. *Fraud & Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hair, J.F., et al. 2007. *Multivariate Data Analysis*. 6 Th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.

- Hasanah, Nuramalia & Fauzi, Achmad. 2016. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Jurnal STAR Vol. XI, No. 1.
- Hoesada, Jan. 2015. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Instintut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mimik Suhendri. 2015. Laporan Proyek Perubahan Instansional Membangun Organisasi Pembelajar Melalui Pembekalan Berjenjang Pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kota Bekasi. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Mustafa, Zainal. 2009. Mengurai Variabel hingga Instrumentasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Kepala BPKP No. PER-500/K/2010. Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Peemrintah (SPIP) di lingkungan Instansi Pemerintah. 2010. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Bekasi No. 64 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bekasi. 2016. Pemerintah Kota Bekasi
- Peraturan Walikota Bekasi No.29 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi. 2016. Pemerintah Kota Bekasi

- Rachmawaty, Dini. 2015. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat). Jurnal Universitas Widyatama.
- Sanusi, Anwar. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Widyatama.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiyono, Budi. 2015. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Simamora, Bilson. 2005. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi, Edy. 2014. SPSS + Amos Statistical Data Analysis. Jakarta: In Media.
- Surat Walikota Bekasi No. 700/334/ITKO. Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Bekasi Tahun 2014. 2015. Bekasi
- Suriagraha, Yogia. 2012. Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kualitas laporan Keuangan Instansi Pemerintah (Survey pada SKPD di Kabupaten Purwakarta). Tesis S2 MAKSI UNPAD
- Suwanda, Dadang & Santosa, Hendri. 2014. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada SAP. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2015. Audit Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2014. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wijayanto, Setyo Hari. 2015. Metode Penelitian menggunakan Structural Equation Modeling dengan LISREL 9. Jakarta: FE Universitas Indonesia.

www. BPK. go.id. Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II

Yamin, Sofyan. 2014. *Rahasia Olah Data LISREL*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yuwono Sony, Utomo Dwi, Zein Suheiry, Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Zamzami, Faiz, Arifin, Ihda & Mukhlis. 2015. *Audit Internal, Konsep dan Praktik (Sesuai International Standards for Professional Practise of Internal Auditing 2013)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halaman ini sengaja dikosongkan
untuk kepentingan penggenapan halaman